

MAMPUKAH MASYARAKAT LOKAL MENJADI PENGELOLA WISATA?

Eva Rachmawati

Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan
Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor 16680
E-mail: evarachmawati@gmail.com

RINGKASAN

Indonesia diakui sebagai salah satu negara dengan sumberdaya wisata terbesar di dunia. Garis pantai terpanjang di dunia, hutan hujan yang luas, keanekaragaman hayati yang besar, beragam suku dan adat istiadat, adalah beberapa dari kekayaan Indonesia. Salah satu konsep wisata yang dapat diterapkan untuk memanfaatkan potensi kekayaan sumberdaya wisata dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal yang berada disekitar sumberdaya wisata tersebut adalah konsep Wisata Berbasis Masyarakat (*Community based Tourism*). Pertanyaannya adalah apakah masyarakat mampu untuk mewujudkan komunitas lokal yang terorganisasi dengan baik dan kohesif, dengan segala mekanisme dan sistem pengelolaan bila kegiatan wisata berjalan. Pada implementasinya, pengembangan kelembagaan tersebut perlu difasilitasi oleh bimbingan pemerintah dan *stakeholder* terkait lainnya yang berkompetensi.

PERNYATAAN KUNCI

- ◆ Pada dasarnya masyarakat lokal belum memiliki kemampuan untuk berperan dalam pengelolaan wisata.
- ◆ Masyarakat lokal belum memiliki kelembagaan yang terorganisasi dengan baik dan kohesif dalam menghadapi mekanisme dan sistem pengelolaan wisata berbasis masyarakat.
- ◆ Meskipun pada dasarnya masyarakat memiliki tingkat pengetahuan dan persepsi yang baik terkait kawasan, namun masyarakat belum mengenal dan memahami industri wisata dan bagaimana mengelola wisata.
- ◆ Disisi lain, pemerintah Indonesia dalam wacananya menempatkan bidang wisata sebagai salah satu upaya penting dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi mereka tidak memberikan dukungan yang nyata, terutama dalam aspek peraturan, kebijakan dan regulasi yang mengatur mekanisme pengembangan dan pengelolaan kegiatan wisata.
- ◆ Dalam rangka mendukung peran serta masyarakat dan sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan suatu dukungan dari pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, berupa adanya mekanisme, aturan dan atau pedoman yang tegas dan jelas sebagai panduan dalam pengembangan dan pengelolaan wisata.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Kebijakan yang perlu diperkuat untuk dapat mendukung pelaksanaan konsep wisata berbasis masyarakat antara lain:

1. Pemberdayaan Masyarakat

- ◆ Mendukung pembangunan dan pengembangan organisasi lokal yang efektif serta peraturan-peraturan yang memungkinkan masyarakat lokal untuk dapat merancang dan mengelola wisata.
- ◆ Meningkatkan komunikasi, diskusi dan kerjasama antara anggota masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah.
- ◆ Meningkatkan peran masyarakat dalam mengawasi dan mengontrol dampak dari kegiatan wisata.
- ◆ Meningkatkan kesadaran dan kapasitas dari masyarakat yang terlibat.

2. Pengembangan Sosial dan Ekonomi

- ◆ Menjamin terjadinya pemerataan distribusi manfaat yang diperoleh dari wisata kepada seluruh anggota masyarakat.
- ◆ Membangun kapasitas masyarakat lokal dalam mengelola wisata.
- ◆ Mendukung pengawasan dan pengontrolan dampak kegiatan wisata secara partisipatif.
- ◆ Mendukung pengembangan partisipatif yang sesuai dengan peraturan bagi pengunjung dan untuk pelayanan wisata.

I. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki potensi sumberdaya wisata yang sangat besar, baik dilihat dari segi fisik, biologi maupun sosial budaya. Dari segi fisik, contoh kecilnya adalah potensi gua. Misalnya di Provinsi Jawa Barat saja, terdapat lebih dari 400

gua yang tersebar di 11 kabupaten (Rachmawati & Sunkar, 2012). Dari segi biologi, dari keanekaragaman hayati, keanekaragaman jenis flora di Indonesia diperkirakan berjumlah sebanyak 25.000 jenis atau lebih dari 10% flora dunia, dan Jenis-jenis hewan yang ada di Indonesia diperkirakan berjumlah sekitar 220.000 jenis yang terdiri atas lebih kurang 200.000 serangga ($\pm 17\%$ fauna serangga di dunia), 4.000 jenis ikan, 2.000 jenis burung, serta 1.000 jenis reptilia dan amphibia. Selain itu, di Indonesia juga terdapat lebih dari 700 suku bangsa dimana setiap suku bangsa di Indonesia memiliki berbagai kebudayaan dan adat istiadatnya. Salah satu potensi budaya yang dapat dikembangkan sebagai obyek wisata, misalnya saja tarian. Di Indonesia terdapat lebih dari 3000 tarian asli Indonesia. Kesemua potensi tersebut, apabila dikembangkan dan dikelola dengan baik, akan dapat meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Salah satu konsep wisata yang dapat diterapkan adalah konsep Wisata Berbasis Masyarakat (*Community based Tourism*). *Community-Based Tourism* (CBT) merupakan konsep wisata yang menitikberatkan pada partisipasi aktif masyarakat lokal.

II. SITUASI TERKINI

Di beberapa kawasan wisata di Indonesia, sudah terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang mencoba untuk mengembangkan kawasan yang berada di sekitar mereka untuk dijadikan sebagai destinasi wisata. Kelompok-kelompok masyarakat tersebut berharap dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan mereka dari pengembangan wisata tersebut. Akan tetapi kenyataannya terdapat berbagai macam kendala

yang muncul, diantaranya tidak terpenuhinya kondisi-kondisi pemungkin (*enabling condition*) dimana masyarakat dapat mengelola wisata dengan baik. Kondisi-kondisi pemungkin tersebut antara lain:

1. Terdapat komunitas masyarakat lokal yang telah terorganisasi dengan baik dan kohesif. Asker *et al.* (2010) menyatakan bahwa untuk menilai apakah komunitas masyarakat lokal telah memiliki organisasi yang kohesif untuk dapat menjalankan CBT yang efektif, harus mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut:
 - a) Memiliki infrastruktur yang layak seperti kantor kesekretariatan dan sumber daya manusia yang memadai.
 - b) Saat ini masyarakat lokal belum memiliki infrastruktur yang jelas misalnya kantor kesekretariatan yang tetap. Kelompok masyarakat ini juga belum memiliki keanggotaan yang tetap. Selama ini, keanggotaan kelompok masyarakat ini ditunjuk berdasarkan kekerabatan atau kedekatan dari anggota lain, dan bukan berdasarkan kompetensinya dalam berorganisasi (Rachmawati 2010).
 - c) Memiliki aturan main yang mengatur keanggotaannya dan tidak rentan terhadap perselisihan antar anggota.
 - d) Saat ini masyarakat lokal belum memiliki aturan main yang pasti dalam mengatur keanggotaan dalam kelompoknya, seperti belum adanya AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga), peran dan tanggung jawab masing-masing anggota, dan landasan hukum yang jelas. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kelompok masyarakat ini mengalami konflik dalam organisasi yang disebabkan

adanya perselisihan antar anggota. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan atau tujuan dalam organisasi yang ditunjukkan dari adanya perbedaan motif dalam pengelolaan wisata.

- e) Memiliki divisi-divisi yang terorganisasi dengan baik.
- f) Saat ini kelompok masyarakat lokal telah membentuk beberapa divisi organisasi dalam pengelolaan wisata, namun belum ada penempatan anggota pada setiap divisinya. Hal ini menyangkut belum adanya keanggotaan yang tetap dalam kelompok tersebut.
- g) Memiliki aset dan sumber keuangan sendiri.
- h) Saat ini kelompok masyarakat lokal belum memiliki sumber keuangan yang memadai. Selama ini pengeluaran yang dilakukan komunitas ini bersumber dari iuran beberapa anggota aktif yang jumlah dan waktunya tidak pasti. Kelompok masyarakat ini juga belum memiliki aset organisasi seperti sarana prasarana yang menunjang kinerja komunitas tersebut.
- i) Memiliki individu yang dapat memimpin kegiatan wisata dan didukung oleh komunitas tersebut.
- j) Saat ini kelompok masyarakat lokal sudah memiliki pemimpin yang ditunjuk dan didukung oleh komunitas tersebut. Dalam kepemimpinannya masih mudah diintervensi dari anggota lain terutama dalam pengambilan keputusan, seperti selalu mendapat desakan dari anggotanya untuk terus menuntut pihak pengelola untuk segera memberi ijin mengelola wisata kepada pihak pengelola.
- k) Memiliki jaringan yang mengerti bagaimana bekerja dengan industri wisata, pemerintah dan partner lainnya.

- 1) Saat ini kelompok masyarakat lokal belum memiliki jaringan dengan pihak profesional di bidang wisata.
2. Partisipasi masyarakat lokal

Partisipasi aktif dari masyarakat lokal berdasarkan prinsip *Community-Based Tourism* (CBT) meliputi partisipasi dari tahap perencanaan hingga pengambilan keputusan dalam pengelolaan wisata (Tomas L.P. *et al.* 2011). CBT yang efektif memerlukan partisipasi aktif dari komunitas lokal dalam penilaian, perencanaan hingga implementasi program (Asker Sally *et al.* 2010). Masyarakat lokal pada dasarnya tidak memiliki latar belakang pengalaman atau pekerjaan di bidang wisata sehingga belum memiliki kemampuan untuk terlibat dalam pengelolaan wisata, seperti dalam tahap perencanaan. Masyarakat lokal, sampai saat ini, sebagian besar hanya memiliki kemampuan sebagai pelaksana kegiatan wisata seperti dalam bidang keamanan, kebersihan, penyedia fasilitas pelayanan pengunjung, dan pemandu wisata. Maka dari itu, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat alam berpartisipasi dalam CBT diperlukan pendampingan dan bimbingan kepada masyarakat lokal dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang peran dan tanggung jawab mereka dalam berpartisipasi aktif pada pengelolaan wisata. Salah satu bentuk bimbingan yaitu dengan cara pengadaan pelatihan untuk masyarakat sekitar untuk meningkatkan kemampuan masyarakat sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam tahap perencanaan hingga implementasi wisata.
3. Kerjasama yang kuat antar stakeholder terkait dalam CBT

Keterlibatan setiap *stakeholder* terkait seperti

organisasi pemerintah, *Non-Governmental Organisations* (NGOs), institusi swasta dan organisasi masyarakat lokal merupakan kunci keberhasilan dari CBT (Tomas L.P. *et al.* 2011, FAO 2001). Kelompok masyarakat yang meminta hak kelola wisata pada dasarnya sudah melakukan kerjasama dengan stakeholder terkait, namun belum terdapat kejelasan peran pada setiap *stakeholder*.

4. Dampak kegiatan wisata

Wisata diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Akan tetapi pada kenyataannya, yang mendapatkan manfaat dari kegiatan wisata tersebut adalah para pendatang yang memiliki modal, terutama modal finansial, yang kuat. Masyarakat lokal hanya sebagian kecil orang saja yang mendapatkan manfaatnya.

Semua situasi dan kondisi tersebut sebagian besar karena tidak adanya aturan dan kebijakan dari pihak pemerintah yang tegas dan jelas yang mengatur mekanisme pengembangan dan pelaksanaan kegiatan wisata di Indonesia, terutama yang terkait dengan peran serta dan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat maupun *stakeholder* yang berinisiatif untuk mengembangkan konsep wisata berbasis masyarakat melakukan pengelolaannya sesuai dengan keinginan dan persepsi masing-masing. Hal ini menimbulkan munculnya semua permasalahan.

III. ANALISIS DAN ALTERNATIF SOLUSI

Kelompok masyarakat lokal yang mengelola wisata masih belum dapat dikatakan sebagai sebuah lembaga yang terorganisasi secara kohesif

berdasarkan kriteria tersebut. Langkah yang perlu dilakukan untuk mewujudkan komunitas lokal yang terorganisasi dengan baik dan kohesif adalah peningkatan pemahaman masyarakat sekitar tentang kelembagaan dan pengembangan kelembagaan dari kelompok masyarakat tersebut. Pengembangan kelembagaan perlu difasilitasi oleh bimbingan pemerintah dan *stakeholder* terkait lainnya yang berkompentensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga masyarakat tersebut belum siap dengan segala mekanisme dan sistem pengelolaan bila kegiatan wisata berjalan. Langkah yang perlu dilakukan agar masyarakat lokal dapat berpartisipasi sesuai kapasitasnya yaitu: menilai/menentukan kapasitas masyarakat dan organisasinya dan eksplorasi berbagai model pengelolaan serta pola kemitraan yang sesuai. Bila masyarakat mengerti kapasitas dan kekuatan organisasi yang mereka miliki, maka masyarakat akan dapat menentukan sendiri sejauh mana partisipasi mereka di dalam CBT. Eksplorasi berbagai model pengelolaan dan pola kemitraan yang sesuai bertujuan untuk menemukan bentuk kolaborasi yang sesuai sehingga setiap *stakeholder* dapat berperan sesuai porsinya.

REFERENSI

Asker, S., Boronyak, L., Carrad, N., Paddon, M. 2010. *Effective Community Based Tourism: a Best Practice Manual*. Sustainable Tourism Cooperative Research Center.

Dwipayana, KEK. 2013. *Hubungan Pengetahuan dan Persepsi Terhadap Perilaku Masyarakat Sekitar dalam Permintaan Hak Pengelolaan KHDTK Cikampek sebagai Kawasan Wisata* [Skripsi]. Bogor: Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan, IPB.

[FAO] Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2001. *Community-Based Tourism: a Case Study From Buhoma, Uganda* [internet]. [diacu 2012 November 23]. Tersedia dari: <http://www.fao.org>.

Rachmawati, E. 2010. *Sistem Sosial Pengembangan Wisata Alam di Kawasan Gunung Salak Endah*. [Tesis]. Bogor: Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan, IPB.

Rachmawati, E., Sunkar, A. 2012. *Pengembangan Ekowisata Gua di Jawa Barat. Laporan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (Desentralisasi)*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Institut Pertanian Bogor.

Sastrayuda, G.S. 2010. *Konsep Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pariwisata (Community Based Tourism)*. [internet]. [diacu 2012 Juni 26]. Tersedia dari: <http://file.upi.edu>

Tomas, L.P., Sandra, S.C., Pavón, V. 2011. *Community - Based Tourism in Developing Countries: A Case Study*. *Tourismos: An International Multidisciplinary Journal of Tourism*. Vol. 6 No. 1 Spring 2011 pp: 69-84.